

Disdik DKI Cairkan Dana KJP Plus Periode Oktober 2022

JAKARTA (IM)- Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mulai mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap pertama periode Oktober tahun 2022 kepada 849.170 orang penerima. KJP Plus merupakan bantuan untuk siswa tingkat SD/MI hingga SMA/MA di seluruh Ibu Kota.

"Jumlah penerima ditetapkan berdasarkan hasil pendataan peserta didik yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan KJP Plus," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Penerimaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Disdik DKI, Waluyo Hadi di Jakarta, Selasa (11/10).

Adapun jumlah penerima bantuan sosial itu, mencapai 409.959 orang jenjang pendidikan SD/MI mencapai dengan total dana yang bisa digunakan Rp 250 ribu per bulan. Untuk SMP/MTs mencapai 226.669 orang dengan nominal dana yang dapat digunakan sebesar Rp 300 ribu. Di jenjang SMA/MA sebanyak 79.763 orang dengan dana yang dapat digunakan mencapai Rp 420 ribu.

Sedangkan di jenjang SMK jumlah penerima mencapai 139.263 orang dengan dana yang dapat digunakan sebesar Rp 450 ribu. Disdik DKI mencatat terjadi penurunan jumlah

penerima dibandingkan 2021 yang mencapai 859.468 orang. Penurunan itu, kata Waluyo, menyesuaikan dengan syarat untuk menjadi penerima ban-sos pendidikan itu. Penentuan kelayakan calon penerima KJP Plus tidak lagi ditetapkan pihak sekolah tetapi didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinsos DKI Jakarta.

Sejumlah persyaratan KJP berdasarkan kjp.jakarta.go.id, adalah sebagai berikut:

1. Siswa/siswi terdaftar dan masih aktif di salah satu sekolah di DKI Jakarta
2. Siswa/siswi terdaftar di DTKS Kemensos, DTKS Jakarta, atau data lain sesuai Keputusan Gubernur DKI
3. Siswa/siswi warga DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta
4. Status kependudukan dibuktikan dengan KK atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Berkas persyaratan calon penerima KJP Plus, di antaranya surat permohonan, formulir pendaftaran, surat pernyataan ketaatan pengguna, foto kopi KTP, foto kopi Kartu Keluarga, hingga surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari kepala Sekolah. ● yan

BNPB Kritik Buruknya Drainase di DKI Picu Banjir, Ini Jawaban Anies

JAKARTA (IM)- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat suara mengenai kritikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait buruknya drainase yang jadi biang kerok banjir di Jakarta.

Anies menegaskan banjir di Jakarta bukan karena drainase di Jakarta buruk tetapi lebih kepada ekstremnya curah hujan yang turun. Hal itu membuat kapasitas sungai, waduk, hingga saluran terlampaui.

La mencontohkan lapangan terbang Halim Perdanakusuma Kusuma yang juga kerap banjir, padahal termasuk ruang terbuka yang juga memiliki ruang terbuka hijau (RTH). Hal tersebut membuktikan banjir bukan hanya perkara drainase dan RTH tetapi juga disebabkan cuaca.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun berfokus pada manajemen respon cepat penanganan banjir. Jajaran aparat SKPD di wilayah harus bersiaga dan segera merespon cepat banjir sehingga dapat surut dalam waktu 6 jam.

"Saya mendengar dari Pak Wali waktu kurang dari 6 jam sesudah permukaan air sungai normal. Kurang dari enam jam surut semua. Itulah manajemen pengelolaan banjir. Ketika volume air hujan melampaui sungai dan melampaui kapasitas drainase tentu akan terjadi genangan akan terjadi banjir," jelasnya, Selasa (11/10) saat meresmikan

pembangunan Skywalk dan Plaza Transit Simpang Temu Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Jadi kita tidak khawatir dengan foto foto genangan itu. Yang kita khawatir kalau genangan berhari-hari baru kami khawatir, itu manajemennya nggak betul. Jadi anda salah bandingkan Jakarta dengan kota kota lain.

Ketika terjadi hujan berapa lama surut di situ lah manajemen. Kalau jumlah hujannya itu di luar kuasa manusia, tapi kalau manajemen itu tanggung jawab kita," tegasnya.

Di Jakarta, ia menggunakan sistem penilaian kinerja untuk menilai seberapa jauh jajaran Pemprov DKI menangan banjir. Standard yang ia terapkan adalah genangan harus surut dalam waktu 6 jam begitu hujan berhenti. Ia pun memastikan seluruh petugas dan aparat Pemprov DKI telah bersiaga menghadapi cuaca ekstrem semingguk ke depan.

"Mereka sudah dikerahkan ke tempat-tempat yang cekung yang biasa terjadi genangan bila ujian lebat, jadi banjir itu diantisipasi. Apa yang dikerahkan? Pompa mobile, truk damkar, bahkan pompa peniraman air tangki tangki dikerahkan. Sehingga ketika hujan tim sudah di lokasi. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Ini bentuk manajemen kalau volume air hujan di luar kendali kita," tuturnya. ● yan

Terkait Kegiatan 2022 Tidak Pasang Papan Nama, DBMSDA Kota Bekasi akan Tegur Direksinya



Pekerjaan Jembatan Kali Pete, Mustikajaya, Kota Bekasi, Sabtu (8/10).

KOTA BEKASI (IM) - Menanggapi pemberitaan media ini edisi Selasa, 11 Oktober 2022 dengan judul, 'Banyak Kegiatan di DBMSDA Kota Bekasi 2022 Tidak Pasang Papan Nama,' Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Solihin dalam pesan WhatsAppnya, Selasa (11/10) mengatakan, jika dirinya akan menegur direktori dari pihaknya.

"Saya akan tegur direktori kami, mungkin spesifik lokasinya bang. Biar saya bisa tahu siapa pengelola dari dinasny (bidang apa)," tulisnya dalam pesan WhatsAppnya, Selasa (11/10).

Sebelumnya, kegiatan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat yang didanai APBD 2022 banyak didapati tidak pasang Papan Nama.

Pelaksana maupun user atas kegiatan-kegiatan dengan nilai kontrak mulai dari

puluhan juta hingga miliaran rupiah itu seolah tutup mata perihal dimaksud.

Padahal, user, pelaksana dan barangkali hingga konsultan pengawas dalam pekerjaannya berpijak pada dasar hukum yang berlaku.

Sebut saja sebagai contoh kegiatan dimaksud seperti Pekerjaan Jembatan Kali Pete, Pondok Timur Indah, Mustikajaya dan Pekerjaan Turap Kali Pete, Pondok Timur Indah, Mustikajaya dan Pekerjaan Betonisasi Jalan di Perumahan Taman Rahayu Regensi, Ciketing Udik, Bantargebang saat disambangi media ini, Sabtu (8/10) didapati tidak dipasang Papan Nama.

Terkait hal itu, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Bekasi, Solihin saat dihubungi lewat pesan WhatsApp guna konfirmasi, Senin (10/10) hingga berita ini diturunkan belum memberi jawaban. ● mdl

4 | Metropolis



IDN/ANTARA

PEMBANGUNAN SKYWALK DAN PLAZA TRANSIT SIMPANG TEMU

Kereta MRT melintas di dekat proyek pembangunan Skywalk dan Plaza Transit Simpang Temu Lebak Bulus di Jakarta Selatan, Selasa (11/10). PT MRT Jakarta (Perseroda) menyatakan progres pekerjaan konstruksi proyek untuk mewujudkan integrasi antarmoda dan pengembangan kawasan berorientasi transit di Jakarta tersebut per 10 Oktober 2022 telah mencapai 86,0 persen.

Pengusaha: Pj Gubernur Harus Fokus Tingkatkan Perekonomian Jakarta

Fokus utama dan prioritas yang harus dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta adalah mengawal proses pemulihan ekonomi Jakarta di tengah turbulensi perekonomian nasional dan global. Mengingat Jakarta di samping sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan juga menjadi pusat ekonomi dan keuangan nasional.

JAKARTA (IM)- Penunjak Kepala Kantor Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Rasyid Baswedan yang berakhir masa tugasnya pada 16 Oktober 2022 dinilai sudah sangat tepat sesuai harapan pelaku usaha sebagaimana hasil Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh DPD HIPPI DKI Jakarta pada 20 September 2022 yang lalu.

"Sebagai penjabat yang pernah berkari di Pemprov DKI Jakarta tentu sudah pasti memahami karakteristik kota Jakarta sebagai kota jasa. Pak Heru per-

nah menjadi Wali Kota Jakarta Utara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri. Dari sisi leadership sudah memiliki kapabilitas yang mumpuni," kata Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjo- rang dalam keterangan resmi, Selasa (11/10).

Artinya nanti ketika memulainya tugas sebagai Penjabat Gubernur tidak perlu adaptasi atau penyesuaian lagi dan langsung bisa bekerja karena sudah mengenal birokrasi Pemprov DKI Jakarta dari dari tingkat Provinsi, Wali kota, kecamatan

dan Kelurahan.

Sarman menilai, sebagai Kasertpres, komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait serta Forkopinda dipastikan semakin efektif dan produktif untuk kelancaran berbagai program pembangunan kota Jakarta.

Fokus utama dan prioritas yang harus dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta adalah mengawal proses pemulihan ekonomi Jakarta di tengah turbulensi perekonomian nasional dan global. Mengingat Jakarta di samping sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan juga menjadi pusat ekonomi dan keuangan nasional yang memberikan kontribusi dan penyokong terhadap perekonomian nasional.

Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta menyumbang 17% dari PDB Nasional yang menjadikan Jakarta sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia, jauh di atas provinsi lain.

Di sektor keuangan, Jakarta memegang peranan penting karena outstanding kredit di Jakarta mencapai 29% dari kredit nasional dan simpanan

masyarakat mencapai 49% dari total simpanan nasional.

Selain itu transaksi non tunai mencapai 40% dari total transaksi sebesar Rp 7,361 triliun. Ekonomi Jakarta juga didominasi sektor keuangan, persewaan, usaha jasa, perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan, dan pariwisata. "Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta menjadikannya sebagai magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor," tutur Sarman.

Pada tahun lalu nilai investasi asing yang masuk ke Jakarta mencapai USD 4,82 miliar, sedangkan investasi dalam negeri mencapai Rp9,26 triliun.

Mengingat ekonomi Jakarta yang sangat strategis maka Pelaku usaha berharap agar Pj Gubernur dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha sehingga target pertumbuhan ekonomi Jakarta 2022 di kisaran 5,3-6,1% (yoy) dapat tercapai. Sehingga diharapkan dapat mampu menekan laju angka pengangguran yang saat ini di angka 8% dan kemiskinan di angka 4,69%.

"Kita berharap berbagai kebijakan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan adanya komunikasi secara berkala dengan para pelaku usaha untuk mendengar berbagai masukan, saran dan pandangan untuk selanjutnya dapat diimplementasikan dalam sebuah kebijakan agar berbagai sektor usaha yang menggerakkan perekonomian Jakarta tumbuh positif dan produktif," imbuhnya.

Dalam memasuki masa transisi perpendahannya ke Kalimantan ke depan, pelaku usaha berharap agar dilibatkan dalam menyusun blueprint yang menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional termasuk dalam revisi UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta yang segera berproses.

"Semoga di bawah kepemimpinan Pak Heru sebagai Pj Gubernur, proses pemulihan perekonomian Jakarta berjalan baik, mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi nasional dan global yang tidak pasti," ucap Sarman. ● yan

TPA Burangkeng Bekasi Kembali Beroperasi Usai Longsor

BEKASI (IM)- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu kembali dapat beroperasi secara normal usai kejadian longsor gunung sampah beberapa waktu lalu.

"Kondisi Burangkeng saat ini sudah terkendali, mobil pengangkut sampah sudah dapat membuang kembali sampah ke TPA, secara berangsur-angsur berjalan normal," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong di lokasi, Selasa (11/10).

Dia mengatakan longsor sampah pada akhir pekan lalu memaksa pihaknya menghentikan sementara aktivitas pembuangan sampah di TPA Burangkeng pada Senin (10/10) kemarin guna memberikan waktu petugas membersihkan dan merapikan kembali.

Kegiatan pengerukan sampah longsor melibatkan seluruh petugas dari enam UPTD Kebersihan untuk membantu proses pengangkutan sampah. Lima unit ekskavator dan dua buldozer juga dikerahkan untuk membersihkan longsor sampah.

"Kami masih terus melakukan pengerukan di lokasi longsor dengan alat berat, kami juga mengerahkan seluruh petugas dari enam UPTD Kebersihan untuk membantu proses angkut," katanya.

Rahmat mengaku penanganan sampah secara konvensional saat ini belum dapat mengendalikan sampah di TPA Burangkeng. Akibatnya terjadi longsor sampah yang diduga terjadi akibat landfill TPA Burangkeng yang telah melebihi kapasitas.

"Ditambah, jarak bibir sungai dengan sampah yang sangat dekat sehingga menyebabkan tanah mengalami abrasi," ucapnya.

Saat terjadi abrasi, kata dia, pagar pembatas yang ada turut roboh hingga mengakibatkan sampah tumpah ke sungai dan menutup sebagian badan sungai.

"Proses pengerukan sampah dari badan sungai ke atas TPA pun saat ini masih terus kami lakukan," katanya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan berbagai upaya untuk mengurugi volume sampah di TPA Burangkeng. "Kami akan bekerja sama dengan PT Indocement. Dari sampah yang telah diolah, selanjutnya akan dijadikan sumber energi bahan bakar Refused Derived Fuel (RDF)," ucapnya.

Pihaknya juga sudah memperbaiki area longsor menggunakan berat ekskavator dan mengurugi lahan bongkar muatan sampah di Zona B dan D agar bisa berfungsi kembali hingga saat ini sudah dapat dioperasikan.

"Untuk Tahun Anggaran 2023, kami akan lakukan rehabilitasi, penataan sampah dan perluasan lokasi, serta peningkatan kapasitas TPA yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perkimtan," kata dia. ● yan



DISTRIBUSI PANGAN BERSUBSIDI DI DKI JAKARTA

IDN/ANTARA

Warga mengambil belanjaan paket bahan pangan bersubsidi berisi telur, beras, susu, daging sapi dan ayam di RPTRA Kedoya Utara, Jakarta, Selasa (11/10). Program pangan murah bersubsidi dari Pemprov DKI Jakarta dengan potongan harga hingga 70 persen tersebut diberikan kepada 1,1 juta penerima yang dibagikan melalui 312 lokasi di seluruh Jakarta.

3 Pelabuhan di Kepulauan Seribu Direvitalisasi

JAKARTA (IM)- Tiga pelabuhan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu direvitalisasi. Anggaran untuk memperbaiki pelabuhan mencapai Rp 200 miliar. Menurut Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPLPD) II Kepulauan Seribu Utara, Sutanto, pembangunan tiga pelabuhan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Tiga pelabuhan yang direvitalisasi yaitu Pelabuhan Pulau Pramuka, Pelabuhan Pulau Kelapa, dan Pelabuhan Pulau Sabira. Sutanto menjelaskan, proyek pembangunan pelabuhan di Pulau Pramuka dan Pulau Kelapa dilakukan mengingat kondisi eksisting dermaga yang sudah puluhan tahun belum direvitalisasi. "Pulau Pramuka dan Kelapa sudah layak direvitalisasi terutama kondisinya. Kalau yang di Pulau Sabira memang tadinya lahan kosong. Tapi warga membutuhkan pelabuhan," jelas Sutanto saat dikonfirmasi, Selasa (11/10).

Ia merinci, di Rp 200 miliar, dibagi untuk Pelabuhan Pulau Pramuka sebesar Rp 78 miliar,

Pelabuhan Pulau Kelapa Rp 52 miliar, dan Pelabuhan Pulau Sabira Rp 69 miliar. Sutanto menyampaikan, alokasi anggarannya dibagi ke dalam dua tahapan, untuk tahun 2022 dan 2023. "Untuk gedung terminal (direvitalisasi) di tahun depan. Anggaran masih dilanjutkan," kata Sutanto.

"Tetap yang Rp 200 miliar itu totalnya. Karena tahun ini kami pakai Rp 100 miliar, tahun depan juga Rp 100 miliar. Kurang lebih begitu," imbuh dia.

Revitalisasi Pelabuhan Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, dan Pulau Sabira sudah berjalan sejak 8 Agustus 2022 lalu. Terkini, proses yang sedang diselesaikan antara lain distribusi material pembangunan tiga pelabuhan dan datan ke masing-masing pulau. Pihaknya menargetkan proses awalakan berlangsung selama 135 hari dengan proyek pembangunan dermaga sandar kapal. Material pembangunan seperti beton, tiang pancang dan sheetpile saat ini tengah dikamalkan menggunakan kapal dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah proses pembangunan dermaga sandar kapal selesai, revitalisasi akan dilanjutkan dengan pembangunan terminal penumpang. ● yan

ANTISIPASI MUSIM PENGHUJAN DATANG

Pemkot Bekasi Keruk Lumpur Sungai, Kali hingga Saluran

BEKASI (IM)- Hadapi cuaca ekstrem serta musim penghujan, Pemerintah Kota Bekasi berupaya melakukan pencegahan dengan salah satunya pengerukan lumpur di sungai, kali hingga saluran air. Kepala Bidang Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Anjar Budiono mengungkapkan, pengerukan lumpur dilakukan secara rutin, hal ini sebagai upaya mengantisipasi musim penghujan.

"Berbagai langkah antisipasi kita rutin melakukan pengerukan lumpur saluran. Dan di saat musim hujan ini, kami makin meningkatkan pengerukan itu serta normalisasi saluran di lingkungan, dengan perbaikan dan pembuatan sodetan, bahwa penyebab banjir di antaranya adalah pendangkalan, penumpukan sampah dan penyempitan saluran termasuk belum terkoneksinya saluran primer dan saluran," ujar Anjar Budiono dalam keterangannya, Selasa (11/10).

Tak hanya itu, pengerukan lainnya pada anak sungai pun telah

dilakukan oleh pihaknya. "Dengan cara ini, diharapkan bisa mengantisipasi genangan air. Beberapa wilayah telah dilakukan," sambung Anjar.

Proses mengantisipasi adanya musim penghujan pun, dilakukan tak sembarang serta serius. Petugas diterjunkan hingga termasuk mengeruk sedimentasi saluran air. Petugas pamatanan pun tak segan masuk ke dalam gorong-gorong untuk mendangkalkan saluran. Menurut Anjar, Pemkot Bekasi melalui DBMSDA terus memaksimalkan pekerjaannya, para petugas pamatanan serta Unit Reaksi Cepat (URC) siap dikerahkan. Bahkan, pengecekan juga rutin dilakukan pada pompa air dan penambahan kapasitas rumah pompa yang ada diberbagai tandon air serta perbaikan tanggul.

"Bekerja, bersiap siaga maka melakukan pengerukan dan peningkatan kapasitas daya tampung saluran di berbagai wilayah, lalu tim URC siaga dalam 24 jam," pungkasnya. ● yan